



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Inovatif

**#bangga
melayani
bangsa**

Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

Bapenda
KAB. MOJOKERTO

LAPORAN KINERJA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

2025



08113513353



sipanjol.mojokertokab.go.id



bapenda@mojokertokab.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto ini merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Bapenda sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan subkegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2025. Selain itu Laporan Kinerja ini juga memberikan gambaran kendala/permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Bapenda Tahun 2025. Selanjutnya Laporan Kinerja akan digunakan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja Bapenda di tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum, saran dan masukan akan kami pergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bapenda ke depan.

Mojokerto, 27 Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



NURUL ISTIQOMAH, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711161997032004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dan dengan 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,51%	23,21%	244,32%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,00%	85,00%	92,39 %
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN	82,00 (Tinggi)	85,53	104,30%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4 Inovasi	4	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,51%	23,21%	244,32%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00 (A)	85,21	100,25%

Kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp33.027.495.411,00 atau 85,00% dari total pagu anggaran sebesar Rp41.139.900.771,00.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Gambaran Umum.....	6
I.3 Isu-isu Strategis.....	9
I.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
II.1 Penjenjangan Strategis.....	16
II.2 Indikator Kinerja Utama.....	211
II.3 Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
III.1 Pengukuran Kinerja.....	26
III.2 Analisis Kinerja.....	27
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya.....	47
III.4 Akuntabilitas Anggaran.....	49
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

1.	Tabel I.2	Sumber Daya Aset Bapenda	6
2.	Tabel II.1a	Matriks Perjenjangan Strategis (2021-2025)	16
3.	Tabel II.1b	Matriks Perjenjangan Strategis (2025-2029)	19
4.	Tabel II. 2a	Indikator Kinerja Utama (2021-2025)	22
5.	Tabel II. 2b	Indikator Kinerja Utama (2025-2029)	23
6.	Tabel II. 3a	Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025	24
7.	Tabel II. 3	Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025	25
8.	Tabel II. 4	Anggaran per Program	25
9.	Tabel III. 1.a	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Tahun 2021-2025)	26
10.	Tabel III. 1.b	Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Tahun 2021-2025)	27
11.	Tabel III.2.1	Perbandingan Realisasi Kinerja per Tahun	33
12.	Tabel III.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Program	44
13.	Tabel III.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Lainnya	47
14.	Tabel III.4	Realisasi Anggaran Tahun 2025	48
15.	Tabel III. 5	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	48

Daftar Gambar

1. Gambar I.1 Struktur Organisasi Bapenda 8

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance, diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan valid sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Bapenda Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang penerimaan dan pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan, khususnya dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjadi instrumen utama dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan

kegiatan, serta pelaporan kinerja Bapenda secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pajak daerah dan opsen pajak di Kabupaten Mojokerto, Bapenda menghadapi tantangan dalam optimalisasi potensi PAD, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan penerimaan pajak daerah. Seiring dengan perkembangan ekonomi daerah dan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan, Bapenda Kabupaten Mojokerto mendorong transformasi digital pengelolaan pajak daerah melalui penerapan sistem e-Tax, pemasangan tapping box pada objek pajak potensial, serta pemanfaatan data transaksi sebagai dasar pengawasan dan pengendalian penerimaan pajak daerah.

Dalam kerangka SAKIP, seluruh program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Mojokerto dirancang dan dievaluasi dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan PAD, yang mencerminkan kinerja organisasi berbasis outcome. IKU tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, termasuk optimalisasi penerimaan pajak daerah dan opsen melalui dukungan digitalisasi sistem perpajakan daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja serta sebagai instrumen evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan nilai SAKIP, penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penerapan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja secara objektif dan berkeadilan di lingkungan Bapenda Kabupaten Mojokerto.

Penyampaian Laporan Kinerja Bapenda tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bapenda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Reviu Renstra Bapenda Tahun 2024-2026, khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan

balik untuk memperbaiki kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang memuat informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun anggaran. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto dilaksanakan berdasarkan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LKJIP menyajikan keterkaitan antara perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya, Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi dalam rangka menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah. Melalui Laporan Kinerja, Bapenda Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan daerah yang berorientasi pada pencapaian target PAD.

ahapan penyusunan Laporan Kinerja diawali dengan pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang bersumber dari dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi program dan kegiatan. Data yang dihimpun mencakup capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk kontribusi penerimaan pajak daerah dan opsen PKB/BBNKB terhadap total PAD Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Analisis tersebut tidak hanya menilai tingkat pencapaian kinerja, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta dampak penerapan digitalisasi perpajakan daerah melalui sistem e-Tax dan pemanfaatan tapping box terhadap peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis kinerja tersebut kemudian disusun dalam bentuk narasi dan tabel kinerja yang menggambarkan capaian sasaran strategis Bapenda Kabupaten Mojokerto secara komprehensif dan terukur. Penyusunan Laporan Kinerja juga memperhatikan keterkaitan antara kinerja organisasi dan kinerja aparatur, sehingga capaian kinerja yang dilaporkan dapat menjadi dasar dalam evaluasi reformasi birokrasi dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja.

Sebagai bagian dari pengendalian mutu, draft Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto selanjutnya dilakukan reviu internal untuk memastikan kesesuaian substansi, kelengkapan data, serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Setelah melalui proses penyempurnaan, LKjIP ditetapkan dan disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun anggaran kepada pihak-pihak terkait.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Laporan Kinerja memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan dengan dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan, sebagai wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil.

Secara hierarkis, penyusunan Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bapenda yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Renstra menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk optimalisasi penerimaan pajak

daerah dan opsen PKB/BBNKB, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan.

Dalam pelaksanaannya, Renstra Bapenda Kabupaten Mojokerto diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahunan yang memuat sasaran, indikator, serta target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja menjadi komitmen kinerja antara Kepala Bapenda dengan Bupati Mojokerto, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran.

Laporan Kinerja disusun untuk mengevaluasi dan melaporkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dilakukan analisis ketercapaian target kinerja, konsistensi antara perencanaan dan realisasi, serta efektivitas strategi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pemanfaatan digitalisasi perpajakan melalui sistem e-Tax dan tapping box dalam mendukung pencapaian target PAD.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk umpan balik (feedback) atas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah disusun. Keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan dan laporan kinerja diharapkan dapat mendorong perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya, sekaligus memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan nilai SAKIP serta reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki peran strategis sebagai dasar evaluasi dan perbaikan perencanaan kinerja pada periode selanjutnya. Laporan Kinerja tidak hanya menyajikan informasi capaian kinerja, tetapi juga memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bapenda, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui analisis capaian target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama Persentase Peningkatan PAD, Laporan Kinerja menjadi sumber informasi utama dalam mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kinerja. Evaluasi atas penerimaan pajak daerah dan opsen PKB/BBNKB, termasuk dampak

penerapan digitalisasi perpajakan melalui sistem e-Tax dan pemanfaatan tapping box, memberikan masukan yang objektif dalam penyusunan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, mulai dari penyesuaian sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra, penetapan target kinerja tahunan dalam Renja, hingga penyusunan Perjanjian Kinerja yang lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada outcome. Dengan demikian, perencanaan kinerja selanjutnya dapat disusun berdasarkan data dan capaian kinerja aktual, bukan semata-mata asumsi.

Dengan menjadikan Laporan Kinerja sebagai umpan balik (feedback) dalam siklus perencanaan kinerja, Bapenda Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja secara berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya mendukung peningkatan nilai SAKIP, penguatan reformasi birokrasi, serta optimalisasi pencapaian target PAD secara berkesinambungan di Kabupaten Mojokerto.

I.2 Gambaran Umum

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terletak di Jl. Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto yang merupakan kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Kantor ini mulai ditempati sebagai kantor operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mulai 18 Maret 2024. Dengan personil karyawan sebanyak 140 orang, terdiri dari 47 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 1 orang tenaga P3K dan 92 orang tenaga P3K Paruh Waktu dengan luas bangunan (kantor) 1600 m2 sangat ideal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah.

Sumber daya aset/modal yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

Tabel 1.2 Sumber Daya Aset Badan Pendapatan Daerah

No.	Jenis Aset / Nama Aset	Total Nilai Asset (Rp)
1.	Tanah	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	13.908.915.245,96
3.	Gedung dan Bangunan	6.650.423.228,95

Sumber data : Laporan Keuangan Bapenda Tahun 2025 (Unauditee)

Bapenda Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.

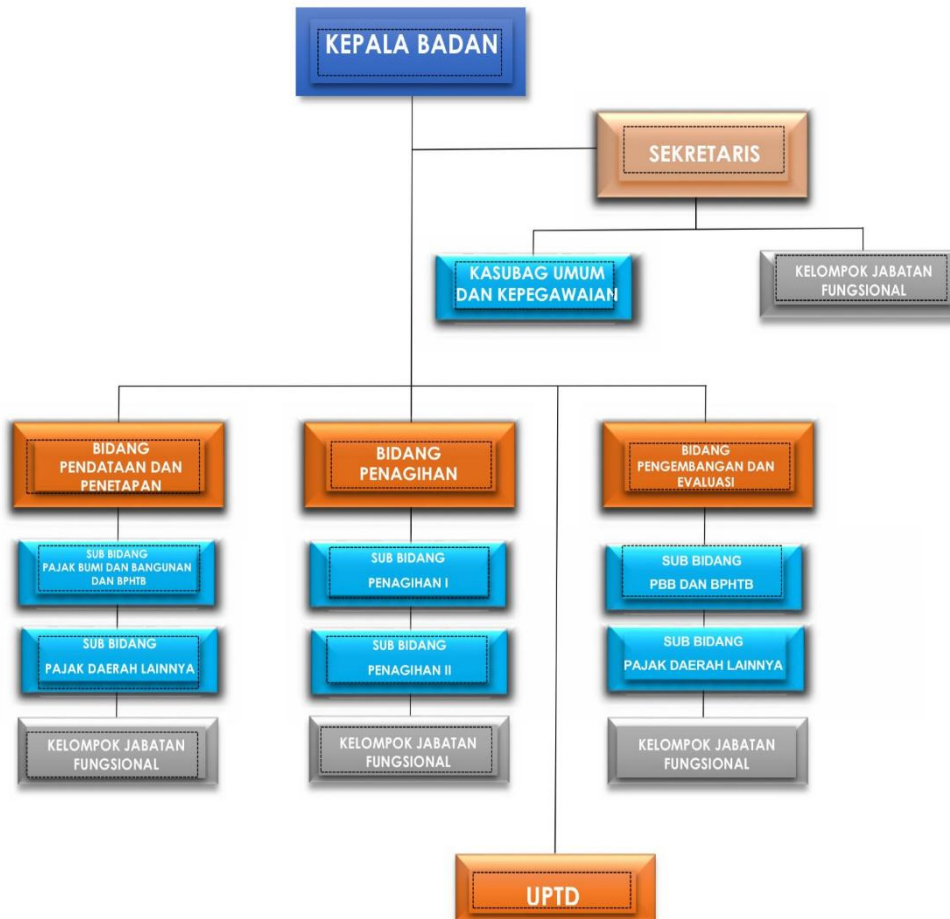
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut;

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto



I.3 Isu-isu Strategis

Tingkat kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam tahun anggaran berjalan secara umum menunjukkan capaian yang positif dan sejalan dengan sasaran strategis organisasi. Pelayanan perpajakan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kepastian pelayanan, guna mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian kinerja pelayanan tersebut tercermin dari realisasi indikator kinerja yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase Peningkatan PAD.**

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, Bapenda Kabupaten Mojokerto terus mendorong transformasi pelayanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan layanan perpajakan berbasis digital, seperti sistem e-Tax dan pemanfaatan tapping box pada objek pajak potensial, telah memberikan dampak positif terhadap kemudahan akses layanan, peningkatan akurasi data transaksi, serta transparansi proses pemungutan pajak daerah dan opsen PKB/BBNKB. Digitalisasi pelayanan tersebut juga berkontribusi dalam menekan potensi kebocoran penerimaan serta mempercepat proses pelayanan kepada wajib pajak.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah masih terdapat beberapa hal kritis yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut. Tantangan yang dihadapi antara lain masih adanya perbedaan tingkat literasi digital wajib pajak, keterbatasan infrastruktur pendukung pada sebagian objek pajak, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem digital perpajakan. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan pihak terkait juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelayanan, khususnya dalam pengelolaan data dan pengawasan penerimaan opsen PKB/BBNKB.

Sebagai tindak lanjut atas hal-hal kritis tersebut, Bapenda Kabupaten Mojokerto terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, penguatan kapasitas aparatur, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perpajakan. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung pencapaian target PAD dan peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah secara keseluruhan.

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan ketrampilan yang memadai dalam pengelolaan pendapatan daerah. Banyak pegawai yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup dalam hal perpajakan, penagihan dan pengelolaan data.

2. Sistem Informasi yang tidak terintegrasi

Masih dipergunakannya system yang terpisah-pisah dan tidak terintegrasi antar OPD Penghasil PAD sehingga mempersulit pengumpulan, pengolahan dan analisis data pendapatan. Ketidakkuratan data dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

3. Tantangan dalam penegakan hukum

Bapenda sering kali menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terkait pajak. Banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak karena kurangnya kesadaran akan kewajiban mereka, serta adanya praktik penghindaran pajak.

4. Minimnya kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan daerah masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat pajak bagi masyarakat, sehingga mereka merasa enggan untuk memenuhi kewajibannya.

5. Perubahan kebijakan dan regulasi

Bapenda harus selalu beradaptasi dengan perubahan ini yang kadang-kadang terjadi secara mendadak dan membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

6. Tantangan teknologi

Jika tidak mengikuti perkembangan teknologi maka Bapenda akan tertinggal dalam hal pengelolaan data dan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang tercapai dalam tahun anggaran berjalan memberikan kontribusi strategis terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Mojokerto, khususnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperkuat kapasitas fiskal

daerah sebagai fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam mendukung misi Kepala Daerah di bidang penguatan perekonomian daerah dan kemandirian fiskal, Bapenda Kabupaten Mojokerto berperan melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan opsen, khususnya opsen PKB dan BBNKB. Capaian kinerja tersebut berdampak langsung pada tersedianya ruang fiskal yang memadai bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk membiayai program-program prioritas pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Realisasi kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto juga selaras dengan pencapaian program nasional di bidang reformasi birokrasi, penguatan desentralisasi fiskal, dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Penerapan SAKIP yang berkualitas, pemanfaatan digitalisasi perpajakan melalui sistem e-Tax dan tapping box, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah mendukung agenda nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam meningkatkan pelayanan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah
2. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku
3. Sinergitas program kegiatan perangkat daerah guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.
4. Penyediaan Sumber Daya Manusia pemungut PAD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan;

2. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil
3. Evaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
4. Sesuai dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka diharapkan ada pengembangan yang lebih luas lagi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
5. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan wajib pajak tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mojokerto;
6. Perbaikan system, prosedur dan tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah dengan pemasangan alat perekam transaksi pada jenis pajak hotel, restoran dan air tanah.
2. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang terbaru
3. Sinergitas program kegiatan OPD guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.
4. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD Penghasil untuk meningkatkan PAD.
5. Dilaksanakan penggalian potensi PAD baru tanpa mengesampingkan regulasi yang sudah ada serta optimalisasi potensi PAD yang sudah ada ditengah situasi pertumbuhan ekonomi yang baru pulih.
6. Penyediaan SDM Pemungut PAD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

7. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan wajib pajak terkait regulasi terbaru

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Penguatan sistem digitalisasi pengelolaan pajak daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah;

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada periode perencanaan selanjutnya. Isu-isu tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan capaian kinerja, tantangan pengelolaan pendapatan daerah, dinamika kebijakan nasional, serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Isu strategis pertama berkaitan dengan **optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, khususnya dari sektor pajak daerah dan opsen PKB/BBNKB. Meskipun realisasi PAD menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal akibat keterbatasan basis data objek dan subjek pajak, kepatuhan wajib pajak yang belum merata, serta dinamika ekonomi regional. Kondisi ini memerlukan penguatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang lebih terarah dan berbasis data.

Isu strategis kedua terkait dengan **penguatan sistem digitalisasi pengelolaan pajak daerah**. Implementasi e-Tax dan tapping box telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akurasi penerimaan, namun masih dihadapkan pada tantangan integrasi sistem, keterbatasan cakupan perangkat, serta kesiapan sumber daya manusia dan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan kesinambungan program pengembangan sistem informasi, peningkatan interoperabilitas data, serta penguatan literasi digital bagi aparatur dan wajib pajak.

Isu strategis berikutnya adalah **peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah** sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan nilai SAKIP serta Zona Integritas. Standar pelayanan yang semakin responsif, mudah diakses, dan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan yang harus diimbangi dengan peningkatan

kompetensi aparatur, penyederhanaan proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi informasi secara konsisten. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, **keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja** masih perlu diperkuat agar program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar berdampak terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya Persentase Peningkatan PAD. Penyelarasan yang lebih kuat antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan LKjIP menjadi prasyarat utama untuk memastikan setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang terukur terhadap sasaran strategis Bapenda dan indikator makro daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan antara lain: (1) penguatan pemutakhiran dan integrasi basis data perpajakan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan; (2) pengembangan dan perluasan digitalisasi layanan perpajakan daerah secara berkelanjutan; (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan teknis dan manajerial yang berorientasi kinerja; serta (4) penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan menindaklanjuti rekomendasi dan catatan strategis tersebut dalam perumusan program dan kegiatan, diharapkan Bapenda Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.a
Matriks Penjenjangan Strategis
(sesuai dokumen perencanaan periode Tahun 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Optimalisasi Peningkatan PAD				Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30%
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			Persentase Peningkatan PAD	9,5%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Persentase Penerimaan PAD	100%
	Pengelolaan Pendapatan Daerah			- Persentase Peningkatan Potensi PAD - Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah - Persentase Penerimaan Pajak Daerah	- 3% - 4% - 100%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	3 Dokumen
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	23750 Laporan
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	13000 Objek Pajak
	Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11000 Layanan
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	251 Dokumen
	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	155 Dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	82,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Menyesuaikan sub)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85 Unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	128 Unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk berperan menunjang Misi ke-3 dengan Tujuan : ***“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan”*** yang direalisasikan melalui penentuan **Sasaran** dalam perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu: ***“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli***

Daerah". dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan misi yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah **“Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”** diukur dengan **indikator Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**.

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.b
Matriks Penjenjangan Strategis
(sesuai dokumen perencanaan periode Tahun 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Optimalisasi Peningkatan PAD				Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30%
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			Persentase Peningkatan PAD	9,5%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Persentase Penerimaan PAD	100%
	Pengelolaan Pendapatan Daerah			- Persentase Peningkatan Potensi PAD - Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah - Persentase Penerimaan Pajak Daerah - Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan - Persentase Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Digital	- 3% - 4% - 100% - 18 Kecamatan - 80%
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	3 Dokumen
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	23750 Laporan
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	13000 Objek Pajak
		Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11000 Layanan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	251 Dokumen
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	155 Dokumen
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat			Nilai Sakip Perangkat Daerah	85
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	1. 80 (Nilai) 2. 90%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	80%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN PD	82,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	80%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar	80 %
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85 Unit

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	80 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	80 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	128 Unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit

II.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas yaitu ***“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”*** diukur dengan **indikator *Persentase Peningkatan PAD.***

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.2a.
Indikator Kinerja Utama
(sesuai dokumen perencanaan tahun 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Persentase	<p>Persentase peningkatan PAD merupakan indikator keuangan yang mengukur peningkatan atau penurunan realisasi penerimaan daerah dari sumber mandiri—pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan—dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini menunjukkan kinerja pemda dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.</p> <p>Rumus Perhitungan: $\frac{\text{Penerimaan PAD Tahun } n - \text{Penerimaan PAD Tahun } (n-1) \times 100\%}{\text{Penerimaan PAD Tahun } (n-1)}$ </p>	Laporan realisasi Penerimaan PAD Tahun n dan n-1
No	Sasaran Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persentase	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Laporan Realisasi Anggaran Bapenda
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	<p>Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi	Inovasi	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah	Laporan Inovasi Perangkat Daerah

Tabel II.2b.
Indikator Kinerja Utama
(sesuai dokumen perencanaan tahun 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	<p>Persentase Peningkatan PAD</p>	<p>Persentase</p>	<p>Persentase peningkatan PAD merupakan indikator keuangan yang mengukur peningkatan atau penurunan realisasi penerimaan daerah dari sumber mandiri—pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan—dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini menunjukkan kinerja pemda dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat</p> <p>Rumus Perhitungan:</p> $\frac{\text{Penerimaan PAD Tahun } n - \text{Penerimaan PAD Tahun } (n-\text{Perencanaan})}{\text{Penerimaan PAD Tahun } (n-1)} \times 100\%$	<p>Laporan realisasi Penerimaan PAD Tahun n dan n-1</p>
		<p>Nilai SAKIP BAPENDA</p>	<p>Nilai</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP</p> <p>Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Ket Nilai :</p> <p>Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	<p>LHE SAKIP dari Inspektora t</p>

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);

- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3a
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(sesuai dokumen perencanaan tahun 2021-2025)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	9,51%	23,21%	244,32%

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, efisien dan akuntabel	1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85	85,21	100,25%
	2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92	85	92,39%
	3	Indeks Profesionalitas ASN	82	85,53	104,30%
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi secara Berkelanjutan	4 Inovasi	4 Inovasi	100%	

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.3b Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 28.226.761.868
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 6.512.550.102

Tabel II.4a
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(sesuai dokumen perencanaan tahun 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	9,51%	23,21%	244,32%
	Nilai SAKIP PD	85,00 (A)	85,21	100,25%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.4.b Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 33.971.691.049
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 7.168.209.722

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 172,28% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sbb :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	9,51%	23,21%	244,06%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00	85,21	100,25%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,00%	85,00%	92,39 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	82,00 (Tinggi)	85,53	104,30%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4 Inovasi	4	100,00%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	9,5%				23,21%	23,21%	244,06%
		Nilai SAKIP PD	85,00			85,21		85,21	100,25%

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 2 kinerja lainnya dengan 4 indikator kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD Tahun } n-1}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun } (n-1)} \times 100\%$

Persentase Peningkatan PAD merupakan ukuran pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun berjalan (n) dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya (n-1). Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber PAD. Capaian indikator “Persentase Peningkatan PAD” di tahun 2025 sampai dengan bulan September 2025 dapat diformulasikan sebagai berikut :

= $\frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n \text{ (sampai dengan September 2025)} - \text{Realisasi PAD Tahun } n-1 \text{ (sampai dengan September 2024)}}{\text{Realisasi PAD Tahun } n-1 \text{ (sampai dengan September 2025)}} \times 100\%$

$\frac{666.788.221.809,77 - 541.973.129.417,69}{666.788.221.809,77} \times 100\%$

= 18,72%

Capaian indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penerimaan PAD Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian antara lain:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
- Optimalisasi pengawasan dan penagihan
- Peningkatan kepatuhan wajib pajak
- Kondisi ekonomi makro dan daya beli masyarakat

Indikator ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan Bapenda dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Disamping kinerja utama Badan Pendapatan Daerah juga mengampu kinerja lainnya seperti tersebut di bawah ini :

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Jumlah inovasi

Kinerja Lainnya :

1. Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah yang dilakukan oleh evaluator berwenang.

Nilai ini menggambarkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi resmi yang dikeluarkan oleh Tim Evaluator SAKIP Pemda.

Capaian Nilai SAKIP di tahun 2025 ini Badan Pendapatan Daerah memperoleh nilai 85,21 yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja. Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan adanya perbaikan dalam penyusunan indikator yang lebih terukur, keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja.

Upaya yang mendukung capaian ini antara lain:

- Penyempurnaan cascading kinerja
- Penguatan monitoring dan evaluasi internal
- Penyelarasan Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan

Dengan capaian yang meningkat, hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kinerja semakin akuntabel dan terstruktur.

1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Persentase Realisasi Anggaran adalah ukuran tingkat penyerapan anggaran dibandingkan dengan total anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Dengan Formulasi :
$$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

Indikator ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD. Tingkat serapan anggaran yang tinggi menunjukkan perencanaan yang realistis dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu.

Capaian realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah sebesar 85,00% menunjukkan masih belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Namun demikian, capaian harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan kualitas output kegiatan.

Namun demikian, capaian realisasi anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya persentase, tetapi juga harus dikaitkan dengan kualitas output dan outcome kegiatan. Efisiensi anggaran menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian kinerja.

Kendala yang umumnya mempengaruhi capaian antara lain:

- Proses administrasi pengadaan
- Perubahan regulasi
- Penyesuaian jadwal kegiatan

Evaluasi atas indikator ini penting untuk perbaikan perencanaan anggaran tahun berikutnya.

1.3 Indeks Profesionalisme ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin ASN sesuai standar yang ditetapkan secara nasional.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN (berdasarkan hasil pengukuran resmi) dan hingga bulan September 2025 masih belum terdapat/keluar nilai.

Capaian indikator ini Badan Pendapatan Daerah memperoleh nilai 85,53 yang masuk dalam kategori Tinggi menunjukkan tingkat kesiapan dan kualitas SDM dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Peningkatan indeks mencerminkan penguatan kompetensi, peningkatan kapasitas, serta pembinaan ASN secara berkelanjutan.

Capaian indeks yang baik menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas ASN berjalan secara berkelanjutan melalui:

- Pendidikan dan pelatihan teknis perpajakan
- Peningkatan kompetensi digital
- Penilaian kinerja individu berbasis SKP

Penguatan profesionalitas ASN menjadi faktor kunci dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.

2. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah

Indikator ini mengukur komitmen organisasi dalam menciptakan pembaruan sistem pelayanan dan tata kelola. Inovasi yang terinternalisasi menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja. Di tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah mempunyai 4 inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan antara lain :

(1) GIS-EL (Geographic Information System Electronic Layout)

(2) SI PANJOL MOBILE (Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online Berbasis Mobile)

(3) SIP DEH (Sistem Infomasi Pajak Daerah)

(4) PESAN PAKDE (Pelayanan Sambang Pajak Daerah ke Desa)

Capaian indikator ini berdampak pada:

- Peningkatan kemudahan layanan pajak
- Efisiensi proses administrasi

- Transparansi dan akuntabilitas
- Peningkatan kepuasan wajib pajak

Keberlanjutan inovasi menjadi aspek penting agar perubahan yang dilakukan tidak bersifat temporer, tetapi memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki sasaran strategis “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” tersebut memiliki 2 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu “Persentase Peningkatan PAD” dan “Nilai SAKIP PD”, dengan formulasi perhitungannya:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun (n)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun (n-1)}} \times 100\%$
		Nilai SAKIP PD	Nilai

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk komitmen kinerja yang disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan antara target kinerja dengan kondisi riil pelaksanaan serta arah kebijakan pembangunan daerah. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan instrumen strategis yang menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Penetapan perubahan perjanjian kinerja ini dilakukan sebagai bentuk respons adaptif terhadap dinamika pelaksanaan program dan perkembangan kondisi fiskal daerah pada tahun berjalan.

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, ditetapkan satu sasaran strategis, yaitu **“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.”** Sasaran ini merupakan representasi dari peran utama Badan Pendapatan Daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, digunakan dua indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Peningkatan PAD, yang mengukur pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan formulasi:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun (n)} - \text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun (n-1)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun (n-1)}} \times 100\%$$

$$\frac{886.771.765.059,90 - 719.708.723.154,97}{719.708.723.154,97} \times 100\%$$

$$\frac{167.063.041.904,93}{719.708.723.154,97} \times 100\%$$

$$= 23,21\%$$

Indikator ini mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan penerimaan secara kuantitatif dan menunjukkan tren pertumbuhan fiskal daerah.

Penggunaan indikator ini menegaskan orientasi pemerintah daerah pada pertumbuhan fiskal yang berkelanjutan serta optimalisasi potensi penerimaan daerah secara progresif dan terukur.

Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan angka pertumbuhan, tetapi juga menunjukkan tingkat keberlanjutan fiskal daerah.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator ini mencerminkan yang merupakan hasil evaluasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada perangkat daerah. Indikator ini menggambarkan kualitas tata kelola kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja secara menyeluruh. Nilai SAKIP tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga menggambarkan tingkat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh.

Badan Pendapatan Daerah mencapai nilai SAKIP sebesar 85,21 di tahun 2025 ini yang mengalami peningkatan dari tahun 2024.

Pemilihan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah tidak semata-mata diorientasikan pada aspek kuantitatif, tetapi juga ditopang oleh penguatan tata kelola dan manajemen kinerja yang akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sistem pengelolaan kinerja organisasi.

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2.1a Perbandingan Realisasi Kinerja per Tahun (Periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	16,40%	8,20%	-3,05%	9,60%	23,21	15,08%	28,45%

Sedangkan untuk realisasi kinerja lainnya di periode tahun 2021-2025 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,00	84,62	84,65	84,95	85,21	85,20	85,21
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,65%	92,15%	84,58 %	91,95%	85%	90%	94,44%
		Indeks Profesionalitas ASN	-	45,00	72,70	81,83	85,53	85	100,62%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	6 Inovasi	3 Inovasi	4 Inovasi	4 Inovasi	4 Inovasi	100-%

Tabel III.2.1b Perbandingan Realisasi Kinerja per Tahun (Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	9,60%	23,21	15,08%	28,45%
		Nilai SAKIP PD	84,95	85,21	85,20	85,21

Capaian indikator “Persentase Peningkatan PAD” di tahun 2025 sebesar 23,21% Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar Rp 851.744.543.548, 00 dan realisasi sebesar Rp 886.771.765.059, 90 dan capaian indikator “Nilai SAKIP PD” di tahun 2025 sebesar 85,21.

Persentase Peningkatan PAD merupakan indikator pertumbuhan yang membandingkan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Secara tren, peningkatan PAD dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika sebagai berikut :

- Tahun (n-2): fase pemulihan pasca tekanan ekonomi
- Tahun (n-1): mulai terjadi stabilisasi dan peningkatan kepatuhan
- Tahun (2025): fokus pada optimalisasi potensi dan digitalisasi

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 mencerminkan keberhasilan strategi intensifikasi melalui:

- Pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak
- Optimalisasi penagihan piutang pajak
- Penguatan pengawasan transaksi usaha

Namun demikian, apabila pertumbuhan belum signifikan, hal tersebut dapat mengindikasikan:

- Basis pajak yang relatif stagnan
- Ketergantungan pada jenis pajak tertentu
- Belum optimalnya penggalan potensi baru

Berdasarkan perkembangan capaian indikator kinerja Sasaran Strategis “*Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*” selama periode 2020–2024, terdapat fenomena strategis dimana beberapa indikator telah melampaui target akhir Renstra sebelum periode perencanaan berakhir.

1. Persentase Peningkatan PAD

Realisasi pertumbuhan PAD menunjukkan dinamika yang fluktuatif, yaitu:

- Tahun 2020 : -2,70%
- Tahun 2021 : 16,40%
- Tahun 2022 : 8,20%
- Tahun 2023 : -3,05%
- Tahun 2024 : 9,60%

Target akhir Renstra ditetapkan sebesar 15,08%, sementara progres capaian telah mencapai 28,45%. Artinya, capaian kinerja telah melampaui target akhir Renstra secara signifikan.

Hal ini bisa diuraikan analisa sebagai berikut :

1. Dinamika Eksternal Ekonomi

Penurunan pada tahun 2020 dan 2023 menunjukkan adanya sensitivitas PAD terhadap kondisi ekonomi makro. Namun, kemampuan rebound pada tahun 2021 dan stabilisasi pada 2024 menunjukkan daya tahan fiskal yang semakin kuat.

2. Strategi Intensifikasi dan Digitalisasi

Optimalisasi sistem pemungutan dan pengawasan berbasis digital turut mendorong peningkatan penerimaan di atas proyeksi awal Renstra.

3. Target Awal yang Relatif Moderat

Terlampauinya target hingga 28,45% mengindikasikan bahwa proyeksi awal Renstra kemungkinan disusun dengan pendekatan konservatif, mempertimbangkan ketidakpastian pasca pandemi.

Dari 3 hal yang di atas dapat membawa beberapa Implikasi Strategis antara lain :

- Diperlukan penyesuaian target kinerja (target recalibration) agar tetap menantang dan mencerminkan potensi riil daerah.
- Ke depan, perencanaan harus berbasis proyeksi potensi fiskal yang lebih presisi dan data-driven.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Perkembangan Nilai SAKIP menunjukkan tren peningkatan yang konsisten:

- 2020 : 82,92

- 2021 : 83,00
- 2022 : 84,62
- 2023 : 84,65
- 2024 : 84,95

Target akhir Renstra sebesar 85,20, dan realisasi terakhir mencapai 85,21, yang berarti telah memenuhi bahkan melampaui target.

Hal ini bisa diuraikan analisa sebagai berikut :

1. Penguatan Sistem Akuntabilitas

Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan perbaikan berkelanjutan pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

2. Konsistensi Tata Kelola

Tren yang stabil dan meningkat mencerminkan tata kelola yang semakin matang dan sistematis.

3. Perlu Lompatan Kinerja

Meski target tercapai, selisih capaian relatif tipis. Untuk mencapai kategori kinerja yang lebih tinggi, dibutuhkan inovasi dan penyempurnaan manajemen kinerja yang lebih progresif.

Dari keseluruhan Analisa di atas dapat disimpulkan bahwa terlampauinya target akhir Renstra sebelum periode berakhir menunjukkan:

- Kinerja organisasi berada pada jalur yang sangat positif.
- Strategi pengelolaan pendapatan dan tata kelola berjalan efektif.
- Kapasitas kelembagaan semakin matang.

Namun demikian, capaian tersebut juga menjadi sinyal perlunya:

- 1.Reviu dan penyesuaian target agar tetap menantang (stretch target).
- 2.Penguatan manajemen risiko untuk menjaga stabilitas pertumbuhan PAD.
- 3.Transformasi strategi dari sekadar pencapaian target menjadi pencapaian kinerja yang berkelanjutan dan adaptif.

Dengan demikian, terlampauinya target akhir Renstra bukanlah titik akhir, melainkan momentum untuk meningkatkan standar kinerja menuju pengelolaan pendapatan daerah yang lebih progresif, resilien, dan berdaya saing.

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai bahkan melampaui target kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis. Capaian kinerja yang tinggi

menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh perencanaan yang matang serta pengelolaan sumber daya yang optimal.

Berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto :

A. FAKTOR PENDUKUNG

1. Komitmen Pimpinan Daerah terhadap Peningkatan PAD

Komitmen pimpinan daerah menjadi fondasi utama dalam mendorong optimalisasi penerimaan daerah. Dukungan tersebut tercermin melalui penetapan target yang progresif, penguatan fungsi pengawasan, serta konsistensi dalam mendorong koordinasi lintas perangkat daerah.

Komitmen pimpinan juga memberikan legitimasi kuat dalam pengambilan kebijakan strategis, seperti penyesuaian regulasi, optimalisasi penagihan piutang, serta penguatan sistem pengawasan pajak. Tanpa dukungan kepemimpinan yang kuat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak akan sulit berjalan optimal.

Implikasi strategisnya adalah meningkatnya kepercayaan internal organisasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan peningkatan PAD.

2. Dukungan Regulasi Pemungutan Pajak Daerah

Keberadaan regulasi yang jelas dan adaptif memberikan kepastian hukum dalam proses pemungutan pajak. Regulasi menjadi dasar dalam menentukan objek pajak, tarif, mekanisme pembayaran, hingga sanksi administratif.

Dukungan regulasi yang kuat memungkinkan Bapenda:

- Melakukan pengawasan secara legal dan terukur
- Menindaklanjuti pelanggaran kewajiban perpajakan
- Mengembangkan inovasi pelayanan tanpa melanggar ketentuan

Regulasi yang selaras dengan dinamika ekonomi juga membantu mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Optimalisasi potensi pajak daerah

Menjadi salah satu faktor utama keberhasilan, yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Upaya ini didukung dengan peningkatan kualitas pendataan wajib pajak, pemutakhiran basis data, serta penguatan pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi daerah.

4. Digitalisasi Sistem Pembayaran Pajak

Transformasi digital dalam sistem pembayaran memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi. Kanal pembayaran elektronik, integrasi dengan perbankan, serta sistem informasi pajak berbasis daring mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Manfaat strategis digitalisasi meliputi:

- Mengurangi kontak langsung yang berpotensi menimbulkan risiko administrasi
- Mempercepat proses pencatatan dan pelaporan penerimaan
- Meminimalisir kebocoran potensi pajak
- Menyediakan data real time untuk analisis penerimaan

Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam membangun budaya pelayanan publik yang modern dan responsif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan pajak daerah turut mendorong peningkatan kinerja. Digitalisasi layanan perpajakan daerah memberikan kemudahan bagi wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, serta mempercepat proses administrasi sehingga berdampak positif terhadap realisasi pendapatan.

4. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Lain

Koordinasi lintas perangkat daerah memungkinkan pertukaran data dan sinkronisasi kebijakan, khususnya terkait perizinan usaha, transaksi properti, dan aktivitas ekonomi lainnya yang menjadi objek pajak.

Kolaborasi ini membantu:

- Memperluas basis pajak
- Mengidentifikasi potensi pajak baru
- Mengurangi duplikasi data
- Meningkatkan akurasi penetapan pajak

Sinergi antar perangkat daerah menjadi elemen penting dalam optimalisasi potensi penerimaan daerah secara menyeluruh. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Badan Pendapatan Daerah dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target kinerja. Dukungan kebijakan pimpinan daerah serta komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional menjadi faktor pendukung keberhasilan

B. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Ketidakstabilan Kondisi Ekonomi

Fluktuasi kondisi ekonomi berpengaruh langsung terhadap kemampuan bayar masyarakat dan pelaku usaha. Penurunan aktivitas ekonomi berdampak pada sektor-sektor yang menjadi basis pajak daerah, seperti sektor properti, perdagangan, dan jasa.

Dampaknya antara lain:

- Menurunnya transaksi jual beli properti (berpengaruh pada BPHTB)
- Penurunan omzet usaha (berpengaruh pada pajak sektor jasa)
- Penundaan pembayaran kewajiban pajak

Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan pajak daerah menjadi tidak stabil dan memerlukan strategi mitigasi berbasis diversifikasi sumber pendapatan.

2. Piutang Pajak yang Masih Tinggi

Piutang pajak yang belum tertagih mengurangi potensi penerimaan riil daerah. Tingginya piutang dapat disebabkan oleh:

- Ketidapatuhan wajib pajak
- Keterbatasan mekanisme penagihan
- Sengketa administrasi

Jika tidak ditangani secara sistematis, piutang pajak berisiko menjadi tidak tertagih dan menurunkan efektivitas pengelolaan fiskal.

Strategi yang diperlukan meliputi penguatan penagihan aktif, pemetaan risiko wajib pajak, serta pemberian insentif atau skema keringanan tertentu sesuai ketentuan.

3. Keterbatasan SDM Teknis Pemungutan

Pengelolaan pajak daerah semakin membutuhkan kompetensi berbasis teknologi dan analisis data. Keterbatasan SDM dalam penguasaan sistem informasi dan teknik analisis potensi pajak dapat menghambat optimalisasi penerimaan.

Dampak dari keterbatasan ini antara lain:

- Belum maksimalnya penggalan potensi pajak baru
- Pengawasan berbasis data yang belum optimal
- Ketergantungan pada metode manual

Peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung transformasi digital perpajakan daerah.

4. Kepatuhan Wajib Pajak yang Belum Optimal

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan struktural. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan
- Persepsi negatif terhadap pajak
- Praktik transaksi yang belum terdokumentasi secara formal

Rendahnya kepatuhan berdampak langsung pada potensi kehilangan penerimaan daerah. Pendekatan yang diperlukan tidak hanya berupa penegakan sanksi, tetapi juga edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan agar tercipta budaya sadar pajak yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, faktor pendukung memberikan fondasi yang kuat bagi peningkatan PAD, sementara faktor penghambat menjadi area strategis yang harus dikelola melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang. Penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan budaya kepatuhan pajak menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ke depan.

Dalam rangka memastikan tercapainya target kinerja, khususnya pada sasaran strategis *Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah melakukan berbagai langkah strategis dan operasional secara terencana dan terukur.

Salah satu langkah konkret yang dilaksanakan adalah Gerakan Tuntas Akhir Tahun Penagihan Pajak Daerah, yang difokuskan pada optimalisasi realisasi penerimaan serta percepatan penurunan piutang pajak. Gerakan ini dilaksanakan secara intensif menjelang akhir tahun anggaran melalui pendekatan penagihan aktif, pemetaan wajib pajak berisiko tinggi, serta penguatan monitoring harian atas capaian penerimaan.

Pelaksanaan gerakan tersebut mencakup:

1. Identifikasi dan klasifikasi wajib pajak dengan tunggakan signifikan.
2. Penerbitan surat teguran dan surat paksa sesuai ketentuan.
3. Intensifikasi koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta aparat kewilayahan.
4. Pendekatan persuasif dan edukatif guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
5. Monitoring dan evaluasi progres penagihan secara berkala melalui rapat evaluasi kinerja.

Selain Gerakan Tuntas Akhir Tahun, Bapenda juga melakukan langkah-langkah pendukung lainnya, antara lain:

- Optimalisasi pemanfaatan sistem pembayaran berbasis digital untuk memudahkan wajib pajak.
- Penguatan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka validasi data objek dan subjek pajak.

Untuk menunjang optimalisasi pemungutan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberi stimulus kepada wajib pajak supaya menunaikan kewajiban perpajakannya, antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian Relaksasi Berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Mojokerto Ke 732 atahun 2025
2. Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Pemberian Relaksasi Berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal, melainkan hasil dari strategi yang

terencana, pengendalian yang konsisten, serta komitmen seluruh jajaran dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Ke depan, pendekatan ini akan terus disempurnakan melalui penguatan manajemen risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalitas sumber daya manusia guna menjaga kesinambungan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Dengan didukung realisasi keuangan yang relatif efisien, Badan Pendapatan Daerah mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien, sehingga target kinerja dapat tercapai bahkan melampaui yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Badan Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, progres capaian Badan Pendapatan Daerah telah mencapai 100,00% lebih. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung *refocusing* prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa:

- penghematan listrik dan air dengan mematikan komputer/AC/lampu/dll saat tidak digunakan;
- penghapusan mamin rapat internal;
- pengurangan anggaran perjalanan dinas

Dari upaya tersebut, telah terjadi efisiensi sebesar Rp1.100.000.000,00. Anggaran hasil dari efisiensi tersebut, dialihkan untuk belanja publik sebagai upaya mengoptimalkan capaian target yang menjadi prioritas kota. Program yang mendukung pencapaian tersebut, yaitu:

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program Penunjang Urusan Lainnya

Target PAD Tahun 2026 pada prinsipnya harus mempertimbangkan kondisi riil 2025, termasuk kekuatan dan hambatan yang ada. Hubungan antar faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan → Target Lebih Progresif

Komitmen pimpinan menjadi leverage utama dalam menetapkan target yang realistis namun menantang. Jika komitmen tetap kuat di 2026, maka ruang peningkatan PAD masih terbuka melalui penguatan pengawasan dan kebijakan strategis.

2. Digitalisasi → Peningkatan Efisiensi & Kepatuhan

Semakin optimal digitalisasi, semakin besar peluang:

- Peningkatan kepatuhan
- Transparansi transaksi
- Pengurangan kebocoran penerimaan

Ini akan langsung berdampak pada kenaikan rasio pertumbuhan PAD 2026.

3. Piutang Pajak → Ruang Peningkatan Cepat

Piutang yang belum tertagih sebenarnya merupakan “potensi penerimaan tertunda”. Jika strategi penagihan diperkuat, ini bisa menjadi sumber peningkatan PAD jangka pendek di 2026.

4. Keterbatasan SDM → Risiko Target Tidak Tercapai

Jika tidak ada peningkatan kompetensi teknis, maka transformasi digital dan pengawasan berbasis data tidak akan optimal, sehingga berisiko menahan pertumbuhan PAD.

Untuk itu dalam langkah ke depannya di tahun 2026 akan dilakukan beberapa rencana aksi dengan mengedepankan skala prioritas sebagai berikut :

SKALA PRIORITAS PENANGANAN 2026-2029 :

1. PRIORITAS TINGGI (Urgent – Dampak Langsung kepada penerimaan riil pajak daerah)

- Penanganan piutang pajak
- Peningkatan kepatuhan wajib pajak
- Penguatan pengawasan transaksi usaha

2. PRIORITAS MENENGAH

1. Peningkatan kompetensi SDM teknis
2. Integrasi data lintas OPD
3. Penyempurnaan regulasi teknis

3. PRIORITAS JANGKA PANJANG

1. Transformasi digital menyeluruh

2. Pembangunan budaya sadar pajak
3. Diversifikasi sumber PAD non-konvensional

Dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan serta memperkuat kapasitas fiskal daerah, sebagai arah kebijakan dan tahapan transformasi yang terukur selama periode Rencana Strategis yang berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, dinamika kondisi ekonomi makro, perkembangan regulasi pengelolaan pajak daerah, serta kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan yang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kuantitas penerimaan, tetapi juga pada pembenahan sistem, penguatan kelembagaan, transformasi digital, serta peningkatan profesionalitas sumber daya manusia.

Melalui pendekatan bertahap dan terstruktur, strategi pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada penguatan fundamental sistem pemungutan, integrasi data lintas sektor, optimalisasi potensi pajak daerah, hingga konsolidasi menuju kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak bersifat insidental, melainkan tumbuh secara stabil, terukur, dan berkelanjutan sehingga diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, sekaligus menjadi instrumen penguatan akuntabilitas publik. Konsistensi implementasi serta komitmen bersama menjadi kunci utama dalam memastikan setiap tahapan strategi dapat terlaksana secara efektif.

Berikut ini akan menguraikan tahapan strategis penguatan dan transformasi pengelolaan pendapatan asli daerah Tahun 2026–2029 secara sistematis dan terarah.

Tabel III.2.2a Perbandingan Realisasi Kinerja Program per Tahun (2021-2025)

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi					Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Tercapainya Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan PAD	115,79 %	109,77 %	97,40%	101,2 3%	104,11%	100,00%	104,11%
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	83,00	84,62	84,65	84,95	85,21	85,20	85,21

Tabel III.2.2b Perbandingan Realisasi Kinerja Program per Tahun (2025-2029)

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi		Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Tercapainya Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan PAD	101,23%	104,11%	100,00%	104,11%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	-	96,78	80	120,97%
		Persentase Realisasi Anggaran PD	91,95%	85,00%	90%	94,4%

Berdasarkan perkembangan indikator Program *Tercapainya Penerimaan PAD* selama periode 2021–2024, secara umum kinerja program menunjukkan capaian yang baik dan relatif stabil, dengan sebagian besar realisasi melampaui target yang ditetapkan.

1. Persentase Penerimaan PAD

Realisasi persentase penerimaan PAD terhadap target tahunan menunjukkan capaian sebagai berikut:

- 2021 : 115,79%
- 2022 : 109,77%
- 2023 : 97,40%
- 2024 : 101,23%

Target akhir Renstra ditetapkan sebesar 100,00%, dengan progres capaian kumulatif mencapai 104,11%. Hal ini menunjukkan bahwa secara agregat, target akhir Renstra telah terlampaui.

Berikut beberapa analisa yang bisa disampaikan terkait capaian kinerja program :

1. Periode 2021–2022: Kinerja Sangat Tinggi

Pada tiga tahun awal, realisasi penerimaan melampaui target secara signifikan. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta optimalisasi pengawasan.

2. Tahun 2023: Penurunan Capaian

Capaian 97,40% menunjukkan tidak tercapainya target tahunan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, atau adanya kebijakan stimulus/relaksasi pajak.

3. Tahun 2024: Pemulihan Kinerja

Realisasi kembali melampaui target (101,23%), menunjukkan kemampuan

adaptasi dan respons kebijakan yang cepat dalam menjaga stabilitas penerimaan.

Secara keseluruhan, fluktuasi yang terjadi masih dalam batas wajar dan menunjukkan resiliensi fiskal yang cukup baik.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP menunjukkan tren peningkatan yang konsisten:

- 2020 : 82,92
- 2021 : 83,00
- 2022 : 84,62
- 2023 : 84,65
- 2024 : 84,95

Target akhir Renstra sebesar 85,20, dengan progres capaian telah mencapai 85,21. Artinya, target akhir Renstra telah terpenuhi.

Peningkatan ini menunjukkan penguatan sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan yang semakin selaras dengan penganggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan PAD :

Faktor Pendorong Keberhasilan :

Keberhasilan capaian program dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

a. Komitmen Pimpinan dan Pengendalian Kinerja

Arahan strategis pimpinan daerah dalam mendorong optimalisasi PAD memberikan dorongan kuat terhadap konsistensi pelaksanaan program.

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Langkah aktif dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak berkontribusi pada capaian di atas target.

c. Digitalisasi Sistem Pembayaran

Pemanfaatan sistem pembayaran berbasis elektronik meningkatkan kemudahan layanan dan transparansi transaksi.

d. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Sinergi dalam validasi data objek dan subjek pajak mendukung peningkatan akurasi basis penerimaan.

e. Penguatan Tata Kelola dan SAKIP

Perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja mendorong peningkatan nilai SAKIP secara konsisten.

Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target (Tahun Tertentu) :

Meskipun secara agregat target terlampaui, terdapat tahun dimana capaian belum optimal (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain:

a. Ketidakstabilan Kondisi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi berdampak langsung terhadap kemampuan bayar wajib pajak.

b. Tingginya Piutang Pajak

Tunggakan yang belum tertagih menghambat optimalisasi realisasi tahunan.

c. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan formal dan material yang belum sepenuhnya optimal memerlukan penguatan pengawasan dan edukasi.

d. Target Tahunan yang Lebih Progresif

Dalam beberapa tahun, target ditetapkan cukup tinggi sehingga membutuhkan effort tambahan untuk mencapainya.

Secara keseluruhan, Program *Tercapainya Penerimaan PAD* menunjukkan kinerja yang baik dan mampu melampaui target akhir Renstra. Fluktuasi tahunan yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan dinamika ekonomi, bukan oleh kelemahan struktural sistem pengelolaan pendapatan.

Capaian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan kinerja, diperlukan:

- Penetapan target berbasis proyeksi potensi riil
- Penguatan manajemen risiko fiskal
- Optimalisasi penanganan piutang pajak
- Peningkatan kepatuhan berbasis digitalisasi dan pengawasan

Dengan langkah tersebut, stabilitas dan pertumbuhan penerimaan PAD dapat terus terjaga hingga akhir periode Renstra dan menjadi fondasi bagi perencanaan periode berikutnya.

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Badan Pendapatan Daerah, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah yang mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 85,21. Peningkatan kinerja

juga dibuktikan melalui nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah yang lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 84,91.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto sebesar 75,67 dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 83,89 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Bapenda	Realisasi Kota	Realisasi Provinsi	Realisasi Pusat
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	23,21%	12,35%	-29,10%	-0,80%
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Bapenda	Realisasi Pemkab	Realisasi Provinsi	
2	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Nilai SAKIP PD	85,21	75,67	83,89	

Pada tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Terbaik II di wilayah Jawa-Bali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen Bapenda dalam mempercepat digitalisasi layanan pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi, serta inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Prestasi ini mencerminkan dedikasi tinggi seluruh jajaran Bapenda dalam:

- Mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi transaksi dan sistem pembayaran.
- Meningkatkan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat dan wajib pajak.
- Mendorong inovasi serta kolaborasi lintas OPD untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Dengan pencapaian ini, Bapenda Kabupaten Mojokerto tidak hanya menunjukkan kinerja unggul secara kuantitatif, tetapi juga kualitas pelayanan yang memuaskan, sekaligus menjadi role model digitalisasi layanan pendapatan daerah di wilayah Jawa-Bali.

Prestasi TP2DD Terbaik II ini menjadi motivasi bagi Bapenda untuk terus meningkatkan inovasi, efisiensi anggaran, dan kepatuhan wajib pajak, sehingga Kabupaten Mojokerto dapat mempertahankan reputasi sebagai pemerintah daerah yang modern, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.

III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebesar Rp41.139.900.771,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp33.027.495.411,00 atau sebesar 85,00% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 33.971.691.049	26.272.422.196	82,91%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 7.168.209.722	6.755.073.215	94,24%

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan PAD	9,51%	23,21%	244,32%	41.139.900.771	33.027.495.411	85,00 %
		Nilai SAKIP PD	85,00 (A)	85,21 (A)	100,25%			
			Rata-rata capaian			Total capaian		85,00 %

Dengan capaian kinerja sebesar 172,28% dan capaian keuangan sebesar 85,00%, efisiensi kinerja Badan Pendapatan Daerah sebesar 202,68%.

Efisiensi Kinerja = $(\text{Capaian Kinerja} \div \text{Capaian Keuangan}) \times 100\%$

- Capaian kinerja = 172,28%
 - Capaian keuangan = 85,00%
- Efisiensi = $(172,28 \div 85,00) \times 100\%$
Efisiensi = 2,0268 x 100%
Efisiensi ≈ 202,68%

Jadi, efisiensi kinerja Badan Pendapatan Daerah sebesar ± 202,68%.

Artinya: dengan realisasi keuangan 85%, kinerjanya bisa mencapai lebih dari dua kali lipat target — ini menunjukkan **Sangat Efisien** .

Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp41.139.900.771,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.027.495.411,00 atau mencapai 85,00%. Secara umum, realisasi tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan yang terkendali dan berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan.

Jika ditinjau berdasarkan program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 82,91%, sedangkan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah mencapai 94,24%. Tingginya realisasi pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan fokus optimal pada fungsi inti organisasi, yaitu pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Lebih lanjut, apabila dibandingkan antara capaian kinerja dan capaian keuangan, diperoleh gambaran yang sangat signifikan. Rata-rata capaian kinerja mencapai 172,28%, sementara capaian keuangan sebesar 85,00%. Dengan menggunakan formulasi:

$$\text{Efisiensi} = (\text{Capaian Kinerja} \div \text{Capaian Keuangan}) \times 100\%$$

diperoleh tingkat efisiensi sebesar $\pm 202,68\%$.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan realisasi anggaran sebesar 85%, Badan Pendapatan Daerah mampu menghasilkan kinerja lebih dari dua kali lipat dari target yang ditetapkan. Secara konseptual, kondisi ini mencerminkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, karena output kinerja yang dihasilkan melampaui proporsi sumber daya yang digunakan.

Keberhasilan ini terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang berdampak langsung pada peningkatan realisasi PAD.
2. Efektivitas pengawasan dan monitoring penerimaan berbasis sistem.
3. Pengendalian belanja operasional yang relatif terkendali tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
4. Sinergi lintas perangkat daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan.

Namun demikian, capaian efisiensi yang sangat tinggi juga perlu dianalisis secara kritis. Tingginya persentase capaian kinerja, khususnya pada indikator Persentase Peningkatan PAD yang mencapai 244,32%, dapat mengindikasikan bahwa target awal

bersifat konservatif dibandingkan potensi riil yang ada. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penetapan target yang lebih progresif dan berbasis proyeksi potensi yang komprehensif agar efisiensi yang dicapai mencerminkan optimalisasi yang semakin akurat.

Secara keseluruhan, efisiensi kinerja sebesar 202,68% menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 telah dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan kinerja yang melampaui ekspektasi. Kondisi ini menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan PAD pada tahun-tahun berikutnya, khususnya dalam kerangka Roadmap Strategis 2026–2029.

BAB IV PENUTUP

Capaian indikator sasaran rencana kerja 2025/2024 yang sesuai dengan Renstra Bapenda Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerimaan PAD dengan capaian kinerja sebesar 9,60% dan capaian anggaran sebesar 83,88%;
2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 84,95 dan capaian anggaran sebesar 92,94%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Bapenda Kabupaten Mojokerto tahun 2025, capaian kinerja rata-rata sebesar 172,28 % dan capaian anggaran sebesar 85,00 % atau pada kategori **Sangat Berhasil**. Dengan capaian kinerja 172,28 % dan anggaran 85,00 %, Bapenda Kabupaten Mojokerto **sangat berhasil**, namun harapan ke depan adalah menjaga keberlanjutan kinerja, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperkuat inovasi serta digitalisasi. Upaya-upaya strategis yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah berikut ini :

Tahun	Target Kinerja PAD/Sasaran Utama	Indikator Keberhasilan	Program/Upaya Strategis
2026	Menjaga capaian kinerja ≥ 175 %	PAD teroptimalkan, realisasi anggaran ≥ 90 %	- Optimalisasi sistem pembayaran online - Edukasi wajib pajak & sosialisasi PAD - Monitoring triwulanan capaian kinerja
2027	Peningkatan efisiensi anggaran menjadi ≥ 92 %	Realisasi anggaran tepat sasaran, tidak ada pemborosan	- Implementasi dashboard monitoring anggaran - Audit internal & pengawasan rutin - Program reward bagi OPD Penghasil dan kecamatan
2028	Digitalisasi layanan pajak dan retribusi 80 % transaksi via online	Jumlah transaksi digital & kepuasan wajib pajak meningkat	- Pengembangan aplikasi mobile & web - Integrasi data wajib pajak - Training SDM pengelola digitalisasi dan teknis - Program konsultasi & asistensi wajib
2029	Peningkatan kesadaran bayar pajak +10 %	Jumlah wajib pajak patuh meningkat, penurunan tunggakan	- Program konsultasi & asistensi wajib pajak - Kampanye edukasi & media sosial - Workshop bagi pelaku UMKM & wajib pajak strategis
2030	Menjadi Bapenda model efisiensi & inovasi di Jawa Timur	Peringkat SAKIP A++ atau sangat tinggi, indikator kinerja PAD stabil tinggi	- Integrasi sistem digital dengan BPKAD & OPD terkait - Benchmarking ke kabupaten/kota sukses lainnya - Program pengembangan SDM lanjutan & sertifikasi kompetensi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target Kinerja PAD / Sasaran Utama:

Meningkatkan dan menjaga capaian PAD serta efisiensi anggaran. Target disesuaikan agar berkelanjutan tapi realistis, mengingat capaian 2025 sudah sangat tinggi (172,28 %).

2. Indikator Keberhasilan:

Mencakup realisasi anggaran, kepatuhan wajib pajak, jumlah transaksi digital, serta peringkat SAKIP.

3. Program / Upaya Strategis:

Fokus pada:

- Digitalisasi dan inovasi layanan → mempercepat transaksi, meningkatkan transparansi.
- Edukasi dan sosialisasi wajib pajak → meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
- Penguatan SDM dan monitoring internal → meningkatkan kapasitas pegawai dan memastikan target tercapai.
- Audit & evaluasi rutin → menjaga akuntabilitas dan mencegah kebocoran PAD.

Keberhasilan pencapaian target Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan wujud nyata komitmen, sinergi, dan kerja keras seluruh jajaran aparatur dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Capaian yang melampaui target tidak hanya mencerminkan efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta semakin baiknya tata kelola pengelolaan pendapatan daerah.

Keberhasilan ini menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung kemandirian fiskal daerah serta memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi pelayanan, penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Dengan semangat kolaboratif dan profesionalisme yang berkelanjutan, Bapenda Kabupaten Mojokerto optimis mampu menjaga tren positif penerimaan PAD sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025.
2. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025.
3. Piagam penghargaan TP2DD
4. Tabel Matriks E-81 Tahun 2025

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197009271991011002

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,50%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85(A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.226.761.868	APBD 2025
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 6.512.550.102	APBD 2025

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197009271991011002

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Istiqomah, SE., M.M.
Jabatan: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albaraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albaraa

Pihak Pertama
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

Nurul Istiqomah, SE., M.M.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197111161997032004

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,51%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.971.691.049	PAPBD 2025
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 7.168.209.772	PAPBD 2025

Mojokerto, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albaraa

Pihak Pertama
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

Nurul Istiqomah, SE., M.M.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197111161997032004

Lampiran 3 ; Penghargaan TP2DD



No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran revisi pada tahun berjalan	Target Kinerja dan Anggaran per Triwulan (untuk anggaran kas)				Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Laporan Kinerja dan Anggaran Revisi Perangko	Realisasi Laporan Kinerja Dan anggaran	Tingkat Capaian	Unit Perangkat Daerah	
					I	II	III	IV	I	II	III	IV					
					Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4									
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja)	- Adanya Perubahan kebijakan masa awal tempo pembayaran pajak PBB 4, 5 - meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak PBB 4,5	Terdapat inovasi PERSAN MAJDE " Pelayanan sambang Pajak Daerah ke Desa - komitmen Kepala Bapenda dalam Optimalisasi Pajak daerah melalui pelaksanaan kunjungan ke tiap desa - Berdaya SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja		Sistem penghitungan dan duplikasi kerja yang mendorong produktivitas.		- Penggunaan teknologi GIS, aplikasi pendataan, dan e-SPTT untuk meningkatkan akurasi data. - Adanya peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan SOP yang jelas sebagai pedoman kerja - Ketersediaan sarana kerja seperti kendaraan operasional, perangkat IT, dan jaringan internet - Cukupan anggaran yang memadai untuk kegiatan pendataan lapangan.										
	Faktor Penghambat Pencapaian Kerja)	- masih banyaknya platang tak bertagih - penyalpulan SPPT yang mendekati batas waktu sahapan kinerja Ta. 1	1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan 2. terdapat perubahan kebijakan terkait komponen Pajak Daerah		Kompetensi teknis dan manajerial pegawai belum merata.		- Kurangnya kompetensi aparaturnya pendataan dan penempatan pajak daerah belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah kerja dan jumlah objek pajak yang harus ditangani. - Perubahan data objek dan subjek pajak yang berlangsung cepat tidak selalu diikuti dengan pemutakhiran data secara berkala, sehingga berpotensi menurunkan akurasi penempatan pajak. - Masih terdapat wajib pajak yang										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub-kegiatan	Indikator Kinerja	Tipe Kinerja dan anggaran reña pada tahun berjalan	Tipe Kinerja dan anggaran per Provinsi (dalam anggaran lain)				Revisi Kinerja Pada Provinsi				Revisi Laporan Kinerja dan Anggaran Reña Perangkat		Revisi Laporan Kinerja Dan anggaran		Tingkat Capaian	Unit Perangkat Daerah	
					I	II	III	IV	I	II	III	IV							
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Thruulan Berikutnya]	melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait	-memberikan Stimulasi kepada Wajib Pajak berupa pembinaan souvenir bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran Online			Melakukan Pembinaan Pegawai dan pelaksanaan diklat teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai													
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Reña Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Thruulan Berikutnya]	melakukan inventarisasi kegiatan sub kegiatan yang belum berakomodir agar dapat ditumbuhkan dalam papad	koordinasi dengan pihak terkait agar pemenuhan pendapatan pajak dapat tepat waktu dan terlaksana dengan baik			Menganggarkan kebutuhan diblat pegawai dalam Reña Perubahan TA. 2025													
						-Melaksanakan pendataan lapangan secara lebih terencana dan terjadwal, khususnya pada wilayah dan jenis pajak yang memiliki potensi peningkatan penemuan -Melakukan sosialisasi terkait kewajiban penyampaian data pajak daerah serta ketentuan penetapan pajak secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.													
						-Melaksanakan pemutakhiran data objek dan subjek pajak daerah melalui kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi lapangan secara bertahap untuk meningkatkan akurasi penetapan pajak. -Melaksanakan pembinaan teknik dan peningkatan kompetensi aparatur dalam rangka mendukung pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.													